

## Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kandui: Faktor Pengaruh dan Tantangan

Gunanta Ginting <sup>1\*</sup>; Aos Kuswandi <sup>2</sup>; Ayuning Budiati <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Pascasarjana, Universitas Terbuka, Palangka Raya, Indonesia; [gunantaginting957@gmail.com](mailto:gunantaginting957@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam 45, Bekasi, Indonesia; [koeswandi.all@gmail.com](mailto:koeswandi.all@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Bandung, Indonesia; [ayoekomara@gmail.com](mailto:ayoekomara@gmail.com)

\*Correspondence : [gunantaginting957@gmail.com](mailto:gunantaginting957@gmail.com)

### ABSTRAK

Partisipasi masyarakat Desa Kandui dalam perencanaan pembangunan desa telah terlaksana dengan baik setiap tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat serta bagaimana tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang menggunakan metode penelitian kualitatif dan peneliti terlibat secara langsung sehingga peneliti dapat melakukan pengamatan secara langsung. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap masyarakat Desa Kandui sebagai informan. Analisis data dilakukan dengan metode yang dikembangkan Miles dan Huberman dengan tiga proses yang saling terkait yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sudah baik namun terdapat kendala karena rendahnya kesadaran masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.

### Kata kunci

*Partisipasi, Perencanaan, Pembangunan Desa.*

### ABSTRACT

The participation of the Kandui village community in village development planning has been carried out well every year. The purpose of this study was to determine how community participation in development planning, what factors influence community participation and how the level of community participation. This study was conducted in Kandui Village, Gunung Timang District using qualitative research methods and researchers were directly involved so that researchers could make direct observations. Data collection was carried out through interviews with the Kandui Village community as informants. Data analysis was carried out using the method developed by Miles and Huberman with three interrelated processes, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that community participation in development planning is good but there are obstacles due to low public awareness and low levels of community education.

### Keywords

*Participation, Planning, Village Development.*

## Pendahuluan

Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah kesatuan masyarakat hukum yang berbatas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai ruang lingkup terkecil dalam struktur pemerintahan merupakan ujung tombak dalam pembangunan nasional. Desa sebagai pelaksana pembangunan yang berada di level paling bawah dari sistem pemerintahan di Indonesia memiliki kapasitas yang besar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Salah satu kewenangan yang diberikan pada Desa melalui UU Desa Nomor 6 tahun 2014 antara lain memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memecahkan berbagai persoalan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Masyarakat dilibatkan dalam menentukan program dan anggaran pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini mengubah paradigma penyusunan program dan anggaran dari semula ditentukan oleh Pemerintah Pusat (*top down*) menjadi anggaran partisipatif yang sifatnya *bottom up*.

Musyawarah dusun dan musyawarah desa merupakan suatu forum musyawarah warga desa yang dilakukan untuk membicarakan masalah utama yang dihadapi desa di tahun anggaran sebelumnya dan mengidentifikasi kebutuhan apa yang dibutuhkan masyarakat desa di tahun anggaran mendatang sebagai acuan dalam penyusunan program kerja pemerintah desa melaksanakan penganggaran dan kegiatan tahunan desa. Dalam pelaksanaan musrenbang desa di Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang, partisipasi masyarakat untuk mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa masih minim, masyarakat masih enggan berpartisipasi karena masyarakat masih kurang menyadari pentingnya berpartisipasi dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dan pelaksanaan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang berasal dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dihasilkan dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Perencanaan merupakan tahapan inti dari penyusunan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa selama satu tahun ke depannya. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa menghasilkan kebijakan pembangunan desa yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pengalokasian anggaran lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Rendahnya partisipasi masyarakat desa Kandui dalam perencanaan pembangunan desa, dibarengi dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan pembangunan. Berdasarkan pengamatan peneliti, Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa terlihat dari jumlah peserta yang memberikan kritik, saran dan masukan pada saat mengikuti musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan mengakibatkan perencanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, adanya pemborosan anggaran karena pembangunan tidak begitu penting dilaksanakan, hasil pembangunan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan hanya menjadi proyek pembangunan yang tidak digunakan serta tidak terawat.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat desa Kandui, kendala yang dihadapi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa adalah waktu pelaksanaan musyawarah dilaksanakan pada siang hari yang berbenturan dengan aktivitas utama masyarakat yang mayoritas sebagai petani. Selain kesadaran masyarakat yang masih rendah, faktor lain yang menghambat partisipasi masyarakat adalah tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan keterbukaan informasi yang sulit diakses masyarakat.

Menurut Sumaryadi (2010) partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil - hasil pembangunan. Dewi, Fandeli dan Baiquni (2013), partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian lingkungan. Disini masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan.

Partisipasi dibagi menjadi empat jenis yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan; partisipasi dalam pelaksanaan; Partisipasi dalam pengambilan manfaat; dan partisipasi dalam evaluasi (Dwiningrum, 2011). *Pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penentuan alternatif kebijakan dengan masyarakat yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi masyarakat turut serta dalam menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. *Ketiga*, partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas

maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari persentase keberhasilan program. *Keempat*, partisipasi dalam evaluasi, berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Abe (2002), mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dikategorikan ke dalam beberapa tingkat atau tahapan, yang berkaitan dengan seberapa besar pengaruh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Tingkat-tingkat partisipasi masyarakat menurut Abe yaitu partisipasi informasi (*informative participation*), partisipasi konsultasi (*consultative participation*), partisipasi keputusan (*decision-making participation*), partisipasi implementasi (*implementing participation*), partisipasi evaluasi (*evaluating participation*), partisipasi pengelolaan (*managing participation*).

Fayol dalam Siagian (2011), mendefinisikan perencanaan sebagai proses memikirkan dan merencanakan langkah-langkah masa depan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurutnya, perencanaan adalah fungsi manajemen pertama dan penting karena melibatkan penentuan arah organisasi, perumusan strategi, serta perencanaan kegiatan untuk memastikan tujuan tercapai. Higgins dalam Hafid Setiadi (2014) menekankan perencanaan pembangunan sebagai proses alokasi sumber daya yang ada dengan memperhitungkan efisiensi dan pemerataan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang diinginkan. Menurutnya, perencanaan pembangunan harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan cara yang adil dan efisien agar hasil pembangunan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020, Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa telah banyak dilakukan dengan fokus pada berbagai aspek seperti partisipasi dalam anggaran, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu penelitian yang relevan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, perlu ditingkatkan, karena masyarakat desa memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai masalah dan kebutuhan mereka (Meka & Mellita, 2022).

Penelitian lain menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dibagi menjadi dua bentuk utama: partisipasi langsung dalam pelaksanaan pembangunan dan partisipasi tidak langsung dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan,

pemanfaatan, serta evaluasi (Wahyudin, et al., 2020). Hal ini menunjukkan pentingnya peran aktif masyarakat baik dalam pelaksanaan maupun dalam pengawasan pembangunan. Penelitian lainnya mengungkapkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Transparansi dapat dicapai melalui pemberian informasi yang jelas kepada masyarakat, seperti dengan memasang banner yang berisi informasi tentang pelaksanaan program pembangunan. Akuntabilitas juga ditegaskan dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang menunjukkan penggunaan dana yang sesuai (Endrawati & Pramudianti, 2020).

Penelitian oleh Walean et al., (2021) menyimpulkan bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa melibatkan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bekerja sama untuk menyusun rencana pendapatan dan pengeluaran desa sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati. Penelitian terakhir oleh Satriani et al., (2022) menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat secara simultan bersama dengan akuntabilitas keuangan kampung berpengaruh terhadap persepsi anggaran, secara parsial, partisipasi masyarakat tidak mempengaruhi persepsi tersebut, sedangkan akuntabilitas keuangan memiliki pengaruh signifikan secara terpisah.

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, sebagian besar berfokus pada aspek anggaran dan akuntabilitas. Penelitian ini akan mengisi gap dengan lebih mendalam mengeksplorasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa secara keseluruhan di Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang. Fokus penelitian ini akan memperluas perspektif dengan melihat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap keseluruhan proses perencanaan pembangunan desa, termasuk pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, serta bagaimana faktor-faktor lokal seperti keterbatasan akses informasi dan pendidikan mempengaruhi tingkat partisipasi dan hasil pembangunan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan teori partisipasi masyarakat yang lebih menyeluruh dan aplikatif dalam konteks pembangunan desa di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa di Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara. Secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Kandui; kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa; dan ketiga, untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di desa tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan yang berguna bagi pemerintahan desa di Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian,

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan prioritas pembangunan yang sesuai dengan harapan masyarakat setempat.

## Metode

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti dalam mengumpulkan data dengan berbagai metode pengumpulan data dan menganalisis data untuk menganalisis secara mendalam proses pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa di Kecamatan Gunung Timang. Hal ini sejalan dengan pernyataan Creswell (2010), studi kasus merupakan strategi penelitian dalam menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli atau data pertama. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan. Sumber data primer adalah masyarakat Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, petani, pengusaha, dan lembaga kemasyarakatan desa di Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, dan data-data pendukung seperti berita acara musyawarah di desa mulai dari musyawarah dusun, musyawarah desa perencanaan dan musyawarah perencanaan pembangunan. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis data (data analysis) terdiri dari tiga sub proses yang saling terkait yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Partisipasi masyarakat desa Kandui dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui forum musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang semua tahapannya dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Setiap

peserta musyawarah diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan dan pendapat tentang rencana kerja pemerintah desa yang telah disusun.

Seperti wawancara dengan tokoh masyarakat Kandui menyampaikan sebagai berikut:

*"Saya selalu diundang dalam rapat Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, selalu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat saya dan kepada seluruh peserta rapat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan permasalahannya" (Hasil wawancara, 2024).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diperoleh data bahwa dalam pelaksanaan musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa Kandui, diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa. Pemerintah desa kandui dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan berdasarkan usulan dari masyarakat dan penetapan prioritas usulan bersama dengan masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Hal senada juga disampaikan oleh masyarakat RT VI yang menyampaikan sebagai berikut:

*"Terimakasih kepada Kepala Desa Kandui yang telah mengundang kami dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sehingga kami dari RT VI bisa menyampaikan kebutuhan prioritas kami karena di tahun ini RT VI tidak masuk prioritas karena keterbatasan anggaran. Dan kami berharap di tahun 2025 usulan kami dari RT VI bisa direalisasikan" (Hasil Wawancara, 2024).*

Pernyataan masyarakat di atas diperoleh data bahwa ada keberlanjutan dari usulan masyarakat pada tahun sebelumnya yang belum dapat direalisasikan karena keterbatasan akan dianggarkan untuk tahun berikutnya. Pelaksanaan program usulan masyarakat yang belum terlaksana pada tahun sebelumnya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di masa mendatang. Dari pernyataan masyarakat di atas diperoleh data bahwa dalam perencanaan pembangunan desa Kandui telah melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam musyawarah desa perencanaan pembangunan merupakan wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa Kandui.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Walean (2021) bahwa dalam perencanaan pembangunan pemerintah desa Sinisir melibatkan masyarakat dalam setiap musyawarah desa. Dalam setiap tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Sinisir memperhatikan aspirasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa. Masyarakat juga dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan usulan dan saran.

## **2. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat**

### **a. Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat**

Peneliti menemukan temuan bahwa kesadaran masyarakat terhadap peran dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan desa masih rendah hal ini terlihat dari kehadiran masyarakat yang masih rendah dalam mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara

dengan masyarakat ditemukan permasalahan bahwa masih ada masyarakat yang masih rendah kesadarannya tentang peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Hal ini diperkuat dengan ketidakhadiran Masyarakat RT VII pada Musyawarah Desa, saat dilakukan wawancara menyatakan:

*“Saya tidak hadir saat musdes karena ada pekerjaan biarlah RT saja yang menghadirinya karena itu tanggung jawab mereka untuk melaksanakannya. Ketua RT pasti tahu tentang masalah dan kebutuhan masyarakatnya” (Hasil Wawancara, 2024)..*

Berdasarkan hasil wawancara di atas ditemukan permasalahan bahwa masih ada masyarakat yang masih rendah kesadarannya tentang peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Hal ini akan menjadi penghambat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa Kandui.

#### **b. Kemampuan dan Sumber Daya Masyarakat**

Kemampuan dan sumber daya masyarakat merupakan faktor fundamental yang memengaruhi tingkat, bentuk, dan kualitas partisipasi dalam pembangunan. Mengembangkan keterampilan, meningkatkan akses informasi, serta memperkuat ekonomi masyarakat dapat mendorong keterlibatan yang lebih aktif dan bermakna, sehingga pembangunan menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tingkat kesejahteraan ekonomi suatu kelompok masyarakat sering kali memengaruhi partisipasi mereka dalam kegiatan pembangunan. Masyarakat dengan ekonomi yang stabil lebih mudah melibatkan diri dalam kegiatan kolektif, karena mereka tidak terlalu terbebani oleh kebutuhan dasar yang mendesak. Sebaliknya, kelompok dengan keterbatasan ekonomi lebih mungkin untuk memprioritaskan kebutuhan hidup sehari-hari sehingga tingkat partisipasinya dalam kegiatan pembangunan cenderung lebih rendah.

Pendidikan dan pengetahuan memungkinkan masyarakat untuk memahami pentingnya keterlibatan dalam pembangunan. Kelompok masyarakat yang memiliki pendidikan yang memadai lebih cenderung terlibat aktif karena mereka dapat mengerti, mengkritisi, dan berkontribusi secara konstruktif dalam diskusi mengenai proyek atau kebijakan pembangunan. Mereka juga dapat memahami manfaat jangka panjang dari keterlibatan dalam proyek pembangunan, sehingga motivasi partisipasinya cenderung lebih tinggi.

Masyarakat yang memiliki keterampilan dan kompetensi teknis khusus, seperti keterampilan dalam bidang teknik, pengelolaan, atau sosial, dapat berpartisipasi lebih aktif dan relevan. Mereka dapat memberikan masukan yang lebih spesifik serta dapat berperan langsung dalam pelaksanaan proyek pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur atau pengelolaan sumber daya lokal. Keterampilan ini memperkuat rasa kontribusi positif dan keterlibatan mereka dalam proses pembangunan.

Faktor waktu juga berpengaruh pada partisipasi masyarakat. Anggota masyarakat yang memiliki waktu luang lebih banyak, seperti mereka yang bekerja dengan jam fleksibel atau para pensiunan, dapat lebih aktif dalam kegiatan komunitas dan pembangunan. Partisipasi yang bersifat sukarela sering membutuhkan waktu dan energi, sehingga masyarakat yang sibuk dengan pekerjaan harian mungkin kesulitan untuk aktif berpartisipasi, terutama dalam jangka panjang.

Sumber daya informasi, seperti akses ke media atau teknologi informasi, memungkinkan masyarakat untuk memahami isu-isu terkini mengenai pembangunan di daerahnya. Dengan informasi yang memadai, masyarakat lebih sadar akan proyek pembangunan dan manfaat potensialnya, yang meningkatkan minat untuk berpartisipasi. Selain itu, teknologi juga bisa membantu komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga proses partisipasi menjadi lebih efektif.

Masyarakat yang secara sosial kuat dan mandiri cenderung lebih percaya diri dan aktif dalam kegiatan pembangunan. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka memiliki dukungan dari keluarga, teman, atau kelompok sosial, mereka akan lebih mungkin untuk terlibat dalam proyek bersama. Kemandirian dalam aspek ekonomi dan sosial juga memungkinkan mereka untuk memberikan kontribusi lebih, karena mereka memiliki sumber daya dan keberanian untuk menyuarakan pendapat dan ikut serta dalam pengambilan keputusan.

#### **c. Keterbukaan dan Transparansi Pemerintah**

Berdasarkan temuan lapangan di Desa Kandui tidak terdapat sarana informasi yang digunakan untuk membagikan informasi kepada masyarakat. Desa Kandui juga belum memiliki website maupun akun sosial sebagai media berbagi informasi secara online kepada masyarakat. Berdasarkan penelusuran di internet terdapat akun media sosial *facebook* atas nama pemerintah desa namun bukan official pemerintah desa kandui. Akun media sosial tersebut dikelola oleh salah satu perangkat desa kandui namun terakhir aktif pada tahun 2022.

#### **d. Kepercayaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Pelaksana**

Berdasarkan pengamatan di lapangan peneliti melihat masyarakat masih menaruh kepercayaan kepada pimpinan di Desa yaitu Kepala Desa dan kepada Kepala Daerah Barito Utara hal ini terlihat dari antusias masyarakat mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kandui yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024 kemarin. Walau transparansi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa tidak terlalu baik (tidak ada baliho penyerapan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2024) masyarakat masih menaruh kepercayaan kepada Pemerintah Desa Kandui karena program kegiatan masih dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kandui tanpa menurunkan kualitas layanan kepada masyarakat.

#### **e. Budaya dan Nilai Sosial**

Budaya dan nilai-nilai sosial masih dipegang teguh oleh masyarakat desa Kandui. Di Desa Kandui ada lembaga adat yang menjaga pelaksanaan adat-istiadat di tengah-tengah masyarakat. Kebiasaan gotong-royong dalam kegiatan adat istiadat serta musyawarah mufakat dalam pemecahan masalah di dalam kehidupan bermasyarakat mendukung partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Desa Kandui memiliki lembaga adat yang dipimpin oleh Damang, Damang adalah gelar bagi seorang tokoh adat yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Dayak. Damang berfungsi sebagai pemimpin adat yang bertugas menjaga dan melestarikan budaya serta hukum adat. Peran Damang sangat dihormati dalam masyarakat Dayak, karena mereka adalah penjaga tradisi, penengah dalam konflik, dan pelindung nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.

#### **f. Kepemimpinan yang Mendukung Pemimpin lokal**

Dari wawancara dengan Ketua BPD diperoleh informasi bahwa karena kesibukan Kepala Desa mengakibatkan kepala desa kurang berbaur dengan masyarakatnya. Namun kepala desa disela-sela kesibukannya masih memberikan pelayanan kepada masyarakat walau di luar jam kerja di rumahnya. Kepemimpinan Kepala Desa Kandui saat ini juga membawa Desa Kandui menerima piagam penghargaan dan lencana Indeks Desa Membangun berstatus Desa Mandiri 2022 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sebagai bukti nyata keberhasilan kepala desa Kandui dalam memimpin Desa Kandui.

#### **g. Tingkat Pendidikan Masyarakat**

Diperoleh data bahwa masyarakat kandui sebagian besar penduduknya di usia lebih dari 40 tahun jenjang pendidikannya masih rendah membuat partisipasi masyarakatnya dalam perencanaan pembangunan masih rendah namun ada harapan bahwa masyarakat dengan usia di bawah 40 tahun yang telah menempuh pendidikan tinggi diharapkan dapat meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di masa mendatang.

#### **h. Persepsi Terhadap Manfaat Pembangunan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat yang menyatakan pemerintahan baik Desa dan Kabupaten selalu menyerap usulan masyarakat walau tidak dapat direalisasikan semuanya karena keterbatasan anggaran, ditemukan kepuasan terhadap pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan di Desa Kandui baik pembangunan segi fisik (infrastruktur) dan non fisik (pemberdayaan masyarakat). Pengalaman yang baik meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam perencanaan pembangunan kedepannya

Dalam konteks partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, penelitian yang dilakukan di Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah terlaksana dengan baik setiap

tahunnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam keberhasilan pembangunan desa (Cornwall, 2008; Pretty, 1995). Meskipun hasil penelitian ini menunjukkan kemajuan dalam partisipasi masyarakat, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas partisipasi tersebut, seperti rendahnya kesadaran dan tingkat pendidikan masyarakat (Suharto, 2019). Partisipasi masyarakat yang baik dalam perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Ginting (2020), partisipasi masyarakat yang aktif dapat mengarah pada perencanaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan pandangan Arnstein (1969) yang mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat harus dilihat sebagai suatu spektrum, di mana tingkat partisipasi yang lebih tinggi memberikan masyarakat lebih banyak kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Namun, untuk mencapai tingkat partisipasi yang optimal, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat. Penelitian oleh Putnam (2000) menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam partisipasi politik dan sosial. Oleh karena itu, program-program pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam proses perencanaan pembangunan.

Hal ini juga sejalan dengan rekomendasi dari World Bank (2006) yang menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi. Lebih lanjut, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat harus diatasi. Penelitian oleh Mansuri dan Rao (2013) menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat dapat meningkatkan hasil pembangunan, faktor-faktor seperti ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan kurangnya akses informasi dapat menghambat partisipasi tersebut. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan menjadi sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Secara keseluruhan, temuan dalam penelitian ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dan menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai partisipasi yang lebih efektif dan inklusif. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat harus menjadi prioritas dalam strategi pembangunan desa. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada literatur yang ada mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas partisipasi dalam konteks pembangunan desa.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa sudah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat kendala terkait rendahnya kesadaran sebagian masyarakat tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam proses tersebut. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terbagi menjadi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi kepemimpinan, budaya dan nilai sosial, kondisi ekonomi, kepercayaan terhadap pemerintah desa, serta pengalaman sebelumnya. Sementara itu, faktor penghambat termasuk rendahnya kesadaran masyarakat tentang peran mereka, tingkat pendidikan yang masih terbatas, dan sulitnya akses terhadap informasi.

Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Kandui saat ini berada pada tahap pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memberikan penyuluhan dan bimbingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menganalisis kebutuhan dan masalah yang ada, serta mencari solusi atas permasalahan tersebut. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui edukasi, misalnya dengan mengadakan webinar. Selain itu, kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten perlu memfasilitasi pelatihan kepemimpinan bagi seluruh kepala desa di Kecamatan Gunung Timang, mengingat peran penting kepemimpinan dalam mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.

Untuk meningkatkan aksesibilitas informasi, Diskominfo Kabupaten Barito Utara dapat memfasilitasi pemerintah desa dalam membangun website resmi desa yang dapat menjadi saluran informasi mengenai pembangunan. Camat Gunung Timang juga sebaiknya mendukung pemerintah desa untuk mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis terkait pengelolaan website dan media sosial resmi pemerintah desa, agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang relevan dengan pelaksanaan pembangunan di desa mereka

## Referensi

- Abe, Alexander. (2002). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok Edukasi
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Cornwall, A. (2008). Unpacking 'participation': Models, meanings, and practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269-283.
- Dewi, Fandeli & Baiquni. 2013. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih. *Jurnal Kawistara*, 3/2, 129-139. <https://journal.ugm.ac.id/index.php/kawistara/article/download/3976/3251>
- Dwiningrum, S.I.A. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Ginting, R. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 1(1), 45-60.
- Hendrawati, E. dan Pramudianti M. (2020). Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12/2, 100-108. <https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3113>
- Irmawati. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 13/1, 1-13. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v13i1.341>
- Kuniawan, R., Mardoni, A. dan Murahman, M. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bukit Ulu Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. *PA Sira: Journal Of Public Administration Musi Raya*, 5/1, 31-37.
- Mansuri, G., & Rao, V. (2013). *Localizing development: Does participation work?* World Bank Policy Research Report.
- Meka, P.S. & Mellita, D. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lebu Rarak Kecamatan Padamaran. *Jurnal Mirai Management*, 7/2, 65-71. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i2.2268>
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Penj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Pretty, J. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247-1263.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Satriani, Indra, et al., (2022). Participatory budgeting di desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*. Vol. 3, No. 2, 574-584
- Setiadi, Hafid. (2014). *Teori Perencanaan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Siagian, Sondang P. (2011). *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Edisi ke-2. Cetakan ke 29. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, A. (2019). Analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 123-134.
- Walean, T., Mantiri, M.S. & Pati, A.B. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 2/1, 1-9.
- World Bank. (2006). *World development report 2006: Equity and development*. World Bank Publications.